JIKES: JURNAL ILMU KESEHATAN
Tahun 2026, Volume 5, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm 1611-1620
e-ISSN: 2963-069X | URL: https://yptb.org/index.php/jik | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/jik.v5i1.2885

ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DI BAGIAN PRODUKSI PT X

Dena Yulianti[1*], Tri Niswati Utami[2], Zuhrina Aidha[3], Susilawati[4], & Zulkarnaen[5]

[*1-5]Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
*e-Mail: denayulianti83@gmail.com

Submit Tgl: 30-September-2026 Diterima Tgl: 01-Oktober-2026 Diterbitkan Tgl: 18-Oktober-2026

Abstrak: Kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi, khususnya di sektor perkebunan, sehingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai PP Nomor 50 Tahun 2012 menjadi penting. Observasi awal di PT X (PT X) menunjukkan sebagian pekerja belum menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap meski kebijakan K3 telah tersedia. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan SMK3, kendala, dan upaya perusahaan mengatasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima informan (*Safety Officer*, mandor lapangan, dan pekerja produksi), lalu dianalisis induktif berdasarkan lima prinsip SMK3 dalam Pasal 6 PP Nomor 50/2012.Hasil menunjukkan penerapan SMK3 di PT X telah sesuai kelima prinsip tersebut, ditandai kebijakan tertulis, perencanaan berbasis HIRARC, program didukung SOP, serta pengakuan Bendera Emas SMK3. Kendala utama adalah rendahnya konsistensi kepatuhan APD akibat habituasi dan ketidaknyamanan, serta kesenjangan persepsi manajemen-pekerja; tidak ada kendala eksternal signifikan. Upaya perusahaan meliputi sanksi bertahap, pelatihan berkelanjutan, dan budaya pengawasan partisipatif. Disimpulkan bahwa keberhasilan SMK3 bergantung pada konsistensi kepatuhan pekerja, bukan hanya kelengkapan sistem. Disarankan perusahaan mengevaluasi kenyamanan APD dan memperkuat umpan balik pekerja-manajemen.

Kata Kunci: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD); Kualitatif; Studi Kasus; Perkebunan Karet

Abstract: *Work accidents remain prevalent in Indonesia, especially in the plantation sector, making implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) under Government Regulation Number 50 of 2012 essential. Preliminary observations at PT X (PT X) showed some production workers had not fully used Personal Protective Equipment (PPE) despite existing OHS policies. This study describes SMK3 implementation, its obstacles, and the company's efforts to address them. A qualitative descriptive case study design was used. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving five informants (Safety Officer, field supervisor, and production workers), then analyzed inductively based on the five SMK3 principles under Article 6 of Government Regulation Number 50 of 2012.Results show SMK3 implementation at PT X generally complied with the five principles, evidenced by a written policy, HIRARC-based planning, SOP-supported programs, and the Gold Flag SMK3 award. The main obstacle was inconsistent PPE compliance due to habituation and discomfort, plus a perception gap between management and workers; no significant external obstacles emerged. Efforts included graduated sanctions, training, and a participatory monitoring culture. SMK3 success is concluded to depend on consistent worker compliance, not*

Copyright©2026: Dena Yulianti, Tri Niswati Utami, Zuhrina Aidha, Susilawati, & Zulkarnaen

merely system completeness. The company is advised to evaluate PPE comfort and strengthen worker-management feedback.t

Keywords: *Occupational Health and Safety Management System (SMK3); Personal Protective Equipment (PPE) Compliance; Qualitative, Case Study; Rubber Plantation*

Cara mengutip Yulianti, D., Utami, T. N., Aidha, Z., Susilawati, & Zulkarnaen. (2026). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja di Bagian Produksi PT X. *JIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan*, *5*(1), 1611–1620. https://doi.org/10.71456/jik.v5i1.2885

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dalam dunia kerja yang bertujuan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain melindungi pekerja, penerapan K3 juga berperan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan perusahaan. Namun, hingga saat ini kecelakaan kerja masih menjadi masalah yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut *International Labour Organization* (ILO), setiap tahun sekitar 2,93 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, sekitar 395 juta pekerja mengalami cedera kerja nonfatal. Data tersebut menunjukkan bahwa keselamatan kerja masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian dari pemerintah, perusahaan, dan seluruh pekerja. Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah dengan jumlah kematian akibat kerja tertinggi di dunia, yaitu sekitar 63% dari total kematian akibat kerja secara global. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, konstruksi, dan perikanan menjadi sektor yang memiliki risiko kecelakaan kerja paling tinggi. Bahkan, ILO menyebutkan bahwa satu dari tiga kecelakaan kerja fatal di dunia terjadi pada sektor pertanian dan sektor sejenis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan hasil pertanian perlu menerapkan sistem keselamatan kerja secara optimal untuk melindungi pekerjanya (International Labour Organization [ILO], 2023).

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Indonesia. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan kerja terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 370.747 kasus, kemudian meningkat menjadi 462.241 kasus pada tahun 2024. Seiring dengan peningkatan jumlah kasus tersebut, nilai klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga meningkat dari Rp3,04 triliun menjadi Rp3,49 triliun. Selain itu, rasio kecelakaan kerja juga meningkat dari sekitar 45 kasus per 10.000 pekerja pada tahun 2016 menjadi 102 kasus per 10.000 pekerja pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kecelakaan kerja di Indonesia masih tergolong tinggi dan memerlukan upaya pencegahan yang lebih efektif (BPJS Ketenagakerjaan, 2025)

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menyumbang kasus kecelakaan kerja. Sebagian besar korban merupakan pekerja usia produktif. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah sehingga muncul rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja agar lebih sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Oleh karena itu, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi salah satu upaya penting untuk menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia. Industri perkebunan karet di Indonesia, khususnya PT X, menghadapi risiko tinggi kecelakaan kerja akibat proses pengolahan lateks, pemeliharaan pohon, dan operasi pabrik

yang melibatkan mesin berat serta bahan kimia berbahaya. Fenomena ini semakin relevan di Sumatra Utara, di mana kondisi cuaca tropis, Medan berbukit, dan tenaga kerja manual memperburuk potensi cedera muskuloskeletal, gangguan pernapasan dari debu karet, serta keracunan pestisida (BPJS Ketenagakerjaan, 2025).

Penerapan SMK3 di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan mengendalikan risiko kerja sehingga tercipta tempat kerja yang aman, sehat, efisien, dan produktif. Penerapan SMK3 dilakukan melalui lima elemen utama, yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Meskipun berbagai perusahaan telah menerapkan SMK3, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah rendahnya kepatuhan pekerja dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Padahal, penggunaan APD merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Rendahnya kepatuhan penggunaan APD menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SMK3 tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan dan prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen manajemen, pengawasan, budaya keselamatan, serta kesadaran pekerja (Bagaskara et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada berbagai sektor industri. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pahlawan menunjukkan bahwa penerapan lima elemen SMK3 pada perusahaan transportasi gas telah berjalan dengan baik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, penelitian dilakukan pada perusahaan yang telah memperoleh penghargaan zero accident, sehingga memiliki kondisi yang berbeda dengan perusahaan yang masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan SMK3 (Utami et al., 2024).

Penelitian lain yang dilakukan pada perusahaan jasa konstruksi menunjukkan bahwa penerapan SMK3 masih berfokus pada aspek kebijakan dan perencanaan K3, sedangkan aspek pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi belum dikaji secara menyeluruh. Penelitian pada industri manufaktur semen juga menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan lima elemen SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Akan tetapi, penelitian tersebut belum membahas secara khusus mengenai kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai bagian dari implementasi SMK3 di lapangan (Annisa et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal di PT X, perusahaan telah menerapkan berbagai program K3, seperti penyediaan APD, safety briefing, pemasangan rambu keselamatan, SOP, dan pengawasan oleh petugas K3. Namun, masih ditemukan beberapa pekerja di bagian produksi yang belum menggunakan APD secara lengkap meskipun perusahaan telah menyediakan dan mewajibkan penggunaannya. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan K3 dengan penerapannya di lapangan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan SMK3 perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, penelitian mengenai penerapan SMK3

Copyright©2026: Dena Yulianti, Tri Niswati Utami, Zuhrina Aidha, Susilawati, & Zulkarnaen

pada industri pengolahan karet dengan pendekatan kualitatif masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Bagian Produksi PT X."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan desain studi kasus (*case study*). Penelitian dilaksanakan di PT X (PT X), Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada April–Mei 2026. Fokus penelitian adalah penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Penelitian juga mengkaji kendala dan upaya perusahaan dalam penerapan SMK3.

Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas *Safety Officer*, mandor atau supervisor, dan tiga orang pekerja. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden

Penelitian dilakukan di bagian produksi PT X, perusahaan perkebunan dan pengolahan karet alam di Provinsi Sumatera Utara. Informan berjumlah lima orang yang mewakili tiga tingkatan dalam struktur K3 perusahaan, yaitu tingkat kebijakan (*Safety Officer*), tingkat pengawasan lapangan (mandor), dan tingkat pelaksana (tiga pekerja produksi). Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan perannya dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bagian produksi (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik informan penelitian

Kode	Jabatan	Peran Sebagai Narasumber
Informan 1	*Safety Officer* (HSE)	Kebijakan dan sistem K3 secara menyeluruh
Informan 2	Mandor lapangan	Pelaksanaan dan pengawasan lapangan
Informan 3	Pekerja produksi 1	Pengalaman langsung pekerja lini produksi
Informan 4	Pekerja produksi 2	Pengalaman langsung pekerja lini produksi
Informan 5	Pekerja produksi 3	Pengalaman langsung pekerja lini produksi

Penerapan SMK3 Berdasarkan Lima Elemen

Penerapan SMK3 dianalisis berdasarkan lima elemen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012, yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut digunakan untuk melakukan triangulasi data sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai penerapan SMK3. Perencanaan. Tujuan dan sasaran K3 ditetapkan setiap tahun sesuai program kerja perusahaan. Identifikasi bahaya dilakukan melalui *Risk Assessment* (RA) dan matriks risiko (*Risk Matrix*). *Safety Officer* menjelaskan alurnya sebagai berikut:

"*Semua pekerjaan harus memiliki SOP terlebih dahulu, kemudian dilakukan penilaian risiko. Setelah tingkat risikonya dinyatakan dapat diterima, pekerjaan tersebut baru boleh dilaksanakan*." (Informan 1)

Mandor terlibat dalam penyusunan SOP bersama tim kerja. Pada pekerjaan pemotongan, misalnya, bahaya luka pada tangan diidentifikasi dan dikendalikan dengan mewajibkan pekerja menggunakan sarung tangan serta memastikan tidak ada pekerja lain di sekitar area kerja (Informan 2). Program K3 disusun melalui rapat lintas departemen, dievaluasi setiap semester, didukung oleh anggaran khusus K3, serta mewajibkan pegawai tertentu memiliki lisensi K3 (Informan 3). Pekerja produksi juga dilibatkan dalam proses identifikasi bahaya, terutama ketika terdapat instalasi atau mesin baru (Informan 5). Selain itu, dokumen RA yang ditemukan dan dipajang di area produksi memuat penilaian terhadap kemungkinan dan tingkat keparahan akibat untuk menentukan tingkat risiko. Temuan tersebut mendukung hasil wawancara dengan para informan.

Pelaksanaan. Program K3 di bagian produksi mengikuti arahan Departemen HSE dan diterapkan seragam di seluruh departemen. Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD) dipastikan melalui *Safety* Patrol berkala oleh HSE dan pemeriksaan harian oleh tiap departemen, sedangkan *Safety Talk* dilaksanakan setiap hari sebelum pekerjaan dimulai. Kesiapsiagaan darurat didukung simulasi berkala dan tim tanggap darurat di setiap departemen. SOP disusun oleh administrasi lalu diverifikasi berjenjang oleh asisten, SHE, dan manajer (Informan 3). Salinan SOP *Service Dryer* yang diperoleh peneliti memuat tanda tangan *Asisten Factory* dan *Processing Manager* serta persetujuan perwakilan *Safety*, *Environment*, dan *Quality*, sehingga konsisten dengan keterangan tersebut. Terhadap pekerja yang tidak memakai APD lengkap, penindakan dilakukan bertahap dari teguran, surat peringatan (SP), hingga pemindahan ke pekerjaan berisiko lebih rendah bila diperlukan (Informan 2).

Meskipun demikian, konsistensi pemakaian APD diakui sebagai persoalan. Informan 3 menyatakan bahwa kendalanya adalah "pelaksanaan pakai APD yang belum konsisten". Informan 4 mengaku selalu memakai APD, tetapi pernah melihat rekan kerja yang tidak memakainya:

"*…mereka sudah terbiasa dengan pekerjaannya sehingga menganggap penggunaan APD tidak terlalu penting."* (Informan 4)

Informan 4 juga menyebut bahwa pemakaian APD "terkadang terasa sedikit merepotkan saat bekerja", meski ia menegaskan hal itu bukan kendala besar. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi (Tabel 2): sarana K3 tersedia dan sebagian besar aspek telah sesuai, tetapi masih ditemukan pekerja yang tidak memakai APD lengkap dan belum sepenuhnya mematuhi SOP penggunaan APD.

Tabel 2. Hasil observasi penerapan K3 di bagian produksi

No	Objek yang diobservasi	Sesuai	Belum Sesuai	Keterangan
1	APD tersedia	√		
2	Pekerja menggunakan helm	√		
3	Pekerja menggunakan *safety shoes*	√		
4	Seluruh pekerja memakai APD lengkap		√	Masih ditemukan beberapa pekerja tidak memakai APD lengkap
5	Pekerja mematuhi SOP penggunaan APD		√	Belum seluruh pekerja patuh
6	APAR tersedia	√		
7	Kotak P3K tersedia	√		

Copyright©2026: Dena Yulianti, Tri Niswati Utami, Zuhrina Aidha, Susilawati, & Zulkarnaen

8	*Housekeeping* baik	√

Pemantauan dan evaluasi. *Safety Patrol* oleh HSE dilakukan setiap bulan dan pemeriksaan departemen setiap hari. Laporan near miss disampaikan bulanan, sedangkan kecelakaan atau kondisi abnormal wajib dilaporkan paling lambat satu jam setelah kejadian untuk diinvestigasi, kemudian direkap HSE untuk dilaporkan kepada manajemen. Audit SMK3 dilaksanakan setiap tiga tahun dan perusahaan telah memperoleh penghargaan Bendera Emas SMK3 (Informan 1). Menurut Informan 3, audit internal dilakukan bersamaan dengan audit ISO, sedangkan audit eksternal dilakukan auditor dari Jakarta dengan temuan yang hanya bersifat minor, misalnya masa berlaku alkohol P3K yang kedaluwarsa. Terdapat pula budaya saling mengawasi (*peer monitoring*): pekerja yang menemukan pelanggaran dapat langsung melaporkannya (Informan 3). Namun, Informan 4 mengaku belum pernah melihat inspeksi secara langsung di area kerjanya, walaupun Informan 1, 2, 3, dan 5 menyatakan inspeksi rutin dilakukan.

Peninjauan dan peningkatan kinerja. Tinjauan manajemen dilakukan melalui rapat P2K3 bulanan. Atas temuan ketidaksesuaian atau kecelakaan, perusahaan melakukan countermeasure terlebih dahulu, menyebarkan tindakan pencegahan ke area lain yang berpotensi serupa, lalu mensosialisasikan hasilnya ke seluruh departemen (Informan 1). Peningkatan kinerja dilakukan melalui pelatihan, coaching, dan sertifikasi, dan setiap keluhan atau kejadian ditindaklanjuti dengan briefing ulang (Informan 3 dan 4). Satu temuan penting berasal dari Informan 3, yang menyebutkan bahwa pelanggar berstatus karyawan tetap dikenai SP1, sedangkan pekerja honorer, buruh harian lepas (BHL), atau tenaga alih daya (FL) yang melanggar “dikeluarkan”. Informasi ini berasal dari satu informan dan belum didukung dokumen kebijakan sanksi. Rekapitulasi kelima elemen disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi kualitatif penerapan SMK3 per elemen

Elemen SMK3	Bukti penerapan utama	Catatan/celah yang ditemukan	Kesimpulan kualitatif
Kebijakan	*Safety Policy* tertulis; sosialisasi berjenjang (mingguan dan harian)	Tidak ditemukan celah berarti (mandor tidak hafal isi rinci)	Sesuai
Perencanaan	RA dan *Risk Matrix* terstruktur; anggaran khusus; partisipasi lintas jenjang	Tidak ditemukan celah berarti	Sesuai
Pelaksanaan	SOP terverifikasi berjenjang; *Safety Talk* harian; sanksi bertahap	Kepatuhan APD belum konsisten (kebiasaan, kenyamanan); pekerja tanpa APD lengkap teramati	Cukup sesuai (perlu penguatan aspek perilaku)
Pemantauan dan evaluasi	Bendera Emas SMK3; audit tiga tahunan; *peer monitoring*; *Safety Patrol* bulanan	Sebagian pekerja tidak melihat langsung inspeksi	Sesuai
Peninjauan dan peningkatan	Rapat P2K3 bulanan; *countermeasure* dan penyebarannya	Perbedaan sanksi pekerja tetap dan non-permanen (satu informan	Sesuai (dengan catatan keadilan sanksi)

Copyright©2026: Dena Yulianti, Tri Niswati Utami, Zuhrina Aidha, Susilawati, & Zulkarnaen

Kendala penerapan SMK3

Kendala utama yang terungkap bersifat internal dan berkaitan dengan perilaku, bukan dengan ketiadaan sistem atau sarana. Pertama, konsistensi kepatuhan APD sebagian pekerja (tindakan tidak aman) yang dipengaruhi kebiasaan dan kenyamanan pemakaian. Kedua, kesenjangan persepsi antara manajemen dan pelaksana: *Safety Officer* menyatakan "tidak ada kendala yang berarti karena penerapan SMK3 telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku", sedangkan Informan 3 dan 4 secara terbuka menyebut konsistensi APD sebagai kendala nyata. Ketiga, visibilitas kegiatan inspeksi di mata sebagian pekerja, seperti diakui Informan 4. Tidak satu pun informan menyebut kendala eksternal yang berarti, baik terkait regulasi, pengawasan dinas ketenagakerjaan, maupun kondisi lingkungan kerja. Perbedaan perspektif antarinforman dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Triangulasi sumber terhadap temuan kendala utama

Sumber	Temuan/perspektif	Posisi
Informan 1 (*Safety Officer*)	Menilai tidak ada kendala berarti; menekankan pencapaian formal (Bendera Emas SMK3)	Manajemen: sistem sesuai regulasi
Informan 2 (mandor)	Menjelaskan sanksi bertahap bagi pelanggar APD	Pengawas: pelanggaran ada dan ditangani secara prosedural
Informan 3 (pekerja 1)	Menyebut faktor SDM/konsistensi APD sebagai kendala utama	Pelaksana: kendala perilaku diakui terbuka
Informan 4 (pekerja 2)	Melihat rekan tidak patuh karena terbiasa; menyebut APD "merepotkan"	Pelaksana: habituasi dan kenyamanan sebagai penyebab
Informan 5 (pekerja 3)	Tidak menyinggung kendala signifikan; menekankan risiko sudah banyak dikendalikan	Pelaksana: relatif puas dengan pengendalian risiko

Upaya perusahaan mengatasi kendala

Upaya yang telah dilakukan meliputi (1) penegakan aturan melalui sanksi bertahap; (2) sosialisasi dan pelatihan berlapis, yakni *Safety Talk* harian, sesi khusus mingguan, dan *safety induction*; (3) budaya pengawasan partisipatif antarpekerja; serta (4) tindak lanjut sistematis atas temuan yang disebarluaskan ke area berisiko serupa. Ke depan, *Safety Officer* menyatakan akan melanjutkan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan. Efektivitas upaya dinilai berbeda: *Safety Officer* menilainya efektif karena tidak ada kecelakaan kerja yang tercatat dan Bendera Emas telah diraih; mandor menilai sanksi bertahap efektif menekan pelanggaran berulang; sedangkan Informan 3 dan 4 memandang persoalan kepatuhan APD masih nyata dan berulang.

Pembahasan

Penerapan SMK3 dan kesesuaiannya dengan regulasi

Temuan menunjukkan bahwa kelima elemen SMK3 pada PP Nomor 50 Tahun 2012, telah dijalankan di bagian produksi PT X, dan pengakuan Bendera Emas SMK3 dari audit eksternal memperkuat gambaran tersebut. Penilaian penerapan SMK3 terhadap PP tersebut juga pernah dilakukan pada perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan transportasi gas (Annisa et al., 2023) Penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak memberikan skor kesesuaian, sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan secara numerik dengan studi-studi tersebut.

Praktik menilai risiko sebelum pekerjaan dilakukan, yang di PT X menjadi prasyarat setiap pekerjaan, sejalan dengan penggunaan identifikasi dan penilaian risiko sebagai dasar pengendalian bahaya pada pekerjaan lain, misalnya pengoperasian forklift (Utami et al., 2024). Gambaran penerapan yang baik pada level sistem ini berbeda dengan sejumlah penelitian pada pekerja pabrik karet dan perkebunan yang lebih menyoroti perilaku pemakaian APD. Elza dkk. melaporkan angka ketidakpatuhan APD sebesar 44,83% pada pekerja pabrik perkebunan di Aceh Singkil (Elza et al., 2023). sedangkan Ullmaziarikhaza dkk. mengkaji hubungan pengetahuan dan sikap dengan pemakaian APD pada pekerja pabrik karet PTPN 3 (Ullmaziarikhaza et al., 2023). Perbandingan ini perlu dilakukan dengan hatihati karena kedua studi bersifat kuantitatif dengan fokus perilaku individu, sedangkan penelitian ini menelaah sistem manajemen secara kualitatif. Meski begitu, temuan observasi di PT X menunjukkan bahwa kelengkapan sistem tidak otomatis berarti kepatuhan penuh di lapangan. Hal ini sejalan dengan perhatian literatur pada kedisiplinan APD sebagai penentu efektivitas SMK3 dalam mencegah kecelakaan kerja (Bagaskara et al., 2025).

Kendala kepatuhan APD dan kesenjangan persepsi

Kendala konsistensi APD dapat dibaca melalui teori domino Heinrich, yang menempatkan tindakan tidak aman sebagai mata rantai kritis dalam urutan penyebab kecelakaan (Othman et al., 2018). Dari kerangka perilaku kesehatan, Devianti dkk. mengelompokkan determinan kepatuhan APD menjadi faktor predisposisi (misalnya sikap), pemungkin (misalnya ketersediaan APD), dan penguat (misalnya pengawasan) (Devianti et al., 2022). Di PT X faktor pemungkin telah terpenuhi karena APD tersedia, sehingga persoalan yang tersisa lebih terkait faktor predisposisi, yakni kebiasaan dan anggapan bahwa APD tidak terlalu penting, serta kenyamanan APD. Kebiasaan yang membuat risiko dianggap remeh ini dapat kita sebut sebagai normalisasi risiko; istilah ini merupakan interpretasi peneliti atas keterangan informan, bukan temuan yang dikutip dari studi lain. Studi tentang faktor perilaku pekerja terhadap pemakaian APD (Salianto et al., 2024) dan tentang ketidakpatuhan APD pada sektor konstruksi (Ershanda & Susilawati, 2024) menunjukkan bahwa persoalan ini tidak khas satu industri.

Kesenjangan persepsi antara *Safety Officer* dan pekerja pelaksana perlu dibaca sebagai dugaan, bukan simpulan pasti, karena manajemen hanya diwakili satu informan. Salah satu penjelasan yang masuk akal adalah bahwa penilaian tingkat manajemen bertumpu pada indikator formal seperti kelengkapan prosedur, audit, dan penghargaan, sedangkan pekerja menilai dari pengalaman sehari-hari di lantai produksi. Bila benar demikian, masukan lapangan mengenai kenyamanan APD dan kebiasaan berisiko berpotensi tidak sampai sebagai bahan evaluasi manajemen. Isu perbedaan sanksi antara pekerja tetap dan non-permanen juga perlu diverifikasi lebih lanjut. Jika kebijakan tersebut benar berlaku, perbedaan itu dapat memengaruhi persepsi keadilan dan keterbukaan pekerja dalam melaporkan pelanggaran atau kejadian nyaris celaka.

Upaya perusahaan dan siklus perbaikan berkelanjutan

Mekanisme *countermeasure* yang disebarluaskan ke area berisiko serupa mencerminkan tahap *Act* dalam siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) Arifin & Aziz (2024), yaitu tindakan perbaikan yang diperluas sebagai pencegahan. *Safety Talk* harian, pengawasan antarpekerja, dan penegakan sanksi bertahap dapat dipandang sebagai faktor penguat perilaku Devianti et al. (2022). Namun, rencana ke depan yang masih berfokus pada pengulangan sosialisasi dan pelatihan berpotensi kurang menyasar faktor predisposisi.

Copyright©2026: Dena Yulianti, Tri Niswati Utami, Zuhrina Aidha, Susilawati, & Zulkarnaen

Berdasarkan temuan, pendekatan yang layak dipertimbangkan adalah evaluasi kenyamanan APD yang digunakan pekerja produksi, kanal umpan balik yang sistematis dari pekerja lapangan kepada manajemen, serta peninjauan kebijakan sanksi agar dirasakan adil oleh seluruh status kepegawaian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SMK3 di bagian produksi PT X telah mencakup lima elemen sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2012, yaitu kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta peninjauan dan peningkatan kinerja. Penerapan tersebut didukung oleh kebijakan tertulis, identifikasi dan penilaian risiko, SOP, *Safety Talk*, pengawasan, audit, serta tindak lanjut perbaikan. Namun, penerapan pada aspek pelaksanaan belum sepenuhnya konsisten karena masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap dan belum sepenuhnya mematuhi SOP penggunaan APD. Kendala yang ditemukan terutama berkaitan dengan kebiasaan, kenyamanan APD, dan perbedaan persepsi mengenai kepatuhan K3. PT X telah melakukan upaya melalui sanksi bertahap, sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, pengawasan antarpekerja, serta tindak lanjut atas temuan K3. Selanjutnya, evaluasi kenyamanan APD dan penguatan mekanisme umpan balik pekerja kepada manajemen dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan konsistensi penerapan SMK3.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N. U., Widiana, D. R., Disrinama, A. M., et al. (2023). Kesiapan implementasi PP No. 50 tahun 2012 di perusahaan jasa layanan konstruksi dengan metode gap analysis. 6(2), 22–27.

Arifin, D., & Aziz, M. L. (2024). Analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) terhadap penurunan tingkat kecelakaan kerja dengan metode PDCA di PT Central Power Indonesia. Jurnal KaLIBRASI.

Bagaskara, D., Mulasari, S. A., & Hariyono, W. (2025). Kedisiplinan penggunaan alat pelindung diri dan efektivitas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam pencegahan kecelakaan kerja: Literatur review. 20, 19–28.

BPJS Ketenagakerjaan. (2025). Kasus kecelakaan kerja tahun 2024. Satu Data Ketenagakerjaan. https://data.go.id/dataset/dataset/kasus-kecelakaan-kerja-tahun-2024

Devianti, I. C., Rupiwardani, I., & Susanto, B. H. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja konstruksi di PT X. Banua *Journal of Kesehatan Lingkungan*, 2(2), 50–58. https://doi.org/10.33860/bjkl.v2i2.1579

Elza, W., Zakaria, R., & Darwis, A. (2023). Faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja pabrik PT Perkebunan Lembah Bhakti Astra di Aceh Singkil. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 9(2), 1530–1542. https://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/view/3423

Ershanda, M., & Susilawati. (2024). Analisis faktor ketidakpatuhan pekerja terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) pada sektor konstruksi. Alahyan Journal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, 2(1), 88–95.

International Labour Organization. (2023). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. ILO News. https://www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-workrelated-accidents-and-diseases

Othman, I., Majid, R., Mohamad, H., Shafiq, N., & Napiah, M. (2018). Variety of accident causes in construction industry. *MATEC Web of Conferences, 203*, 02006. https://doi.org/10.1051/matecconf/201820302006

Pemerintah Republik Indonesia. (2012).*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Sekretariat Negara.

Salianto, Tarigan, A. R., Apriyuni, A., & Febrian, A. (2024). Faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja terhadap kepedulian penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk pencegahan penyakit akibat kerja. *Jurnal Riset Kesehatan Modern*. https://journalpedia.com/1/index.php/jrkm/article/view/3409

Ullmaziarikhaza, N., Yusnidar, Yarmaliza, M., Fahlevi, M. I., & Saputra, F. F. (2023). Hubungan pengetahuan dan sikap dengan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja pabrik karet PTPN 3 Kebun Bandar Betsy. *Jurnal Kesehatan Tambusai*.

Utami, T. N., Amanda, C. A., Azri, N. I., et al. (2024). Identifikasi risiko dan penilaian risiko terhadap bahaya fisik pada pengoperasian forklift di PT X. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(3), 6680–6690*. https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.37852